

Publik Relation

INTEGRITAS NASIONAL DAN KECERDASAN BANGSA

Oleh : Fachry Ali

Publik Relation (PR) adalah "Halaman depan" sebuah jawatan. Tugas paling pokok lembaga PR adalah menjadi penghubung antara sebuah jawatan dengan publik yang menjadi konstituennya. Pada saat yang sama, Lembaga PR juga menjadi penghubung antara masyarakat atau publik dengan jawatannya sendiri. Sebagai akibatnya, sebuah Lembaga PR menjadi penengah di antara kelompok tersebut.

Perannya sebagai "halaman depan" berarti bahwa penilaian-penilaian konstruktif atas jawatannya sangat ditentukan kinerja lembaga PR. Kemampuan Lembaga PR merumuskan gagasan-gagasan informative tentang jawatannya berhadapan langsung dengan pihak-pihak luar yang menjadi konstuenya. Sebaliknya, kemampuannya mengumpulkan informasi kemasyarakatan dari jajaran konstituennya, lalu merumuskannya dengan tepat akan juga mempengaruhi terhadap kualitas daya tanggap jawatan tersebut berbagai issue dan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Strategisnya posisi lembaga PR sebagai "halaman depan" sebuah jawaban ini kian terasa jika diletakkan dengan Polri. Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002, Polri bukan saja telah menjadi unit kesatuan tersendiri yang terpisah dengan ABRI (kini TNI), tetapi juga merupakan satuan



Fachry Ali

**"Peran PR sebagai
"halaman depan"
Polri berarti bahwa
kebaikan dan
keburukan jawatan
ini dihadapan publik
ditentukan oleh
kapasitas lembaga
PR-nya dalam
merumuskan dan
mendiminasikan
informasi yang layak
dan masuk akal"**

sipil yang mempunyai hak konstitusional menggunakan senjata dan hukum untuk menciptakan keamanan dalam negeri. Dalam posisi semacam ini, tidak seperti satuan-satuan TNI lainnya, Polri harus berhadapan

dengan masyarakat secara langsung. Dan karena masyarakat bukanlah sebuah kontainer, seperti dinyatakan sejarawan Fernand Braudel, melainkan berbagai kontainer dengan isi yang berbeda-beda, maka dengan sendirinya Lembaga PR Polri berhadapan dengan aneka kelompok masyarakat dengan aspirasi dan pikiran yang beranekaragam. Perannya sebagai "halaman depan" Polri berarti bahwa kebaikan dan keburukan jawatan ini dihadapan publik ditentukan oleh kapasitas lembaga PR-nya dalam merumuskan dan mendiminasikan informasi yang layak dan masuk akal. Maka, sulit dinyatakan bahwa posisi lembaga PR dalam Polri menjadi sesuatu yang mudah. Dinamika aspirasi masyarakat yang beragam tersebut bukanlah dunia yang mudah terbujuk oleh informasi-informasi yang bersifat "pasaran".

Secara teoritis, terutama di dalam masyarakat-masyarakat Negara berkembang seperti Indonesia, peranan lembaga PR Polri, dengan demikian, adalah *Spearhead* (ujung tombak) dalam memahami tahap-tahap perkembangan.

Kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dalam konteks sejarah, tahap-tahap kesadaran ini berlangsung secara gradual (perlahan-lahan). Kesatuan-kesatuan masyarakat pada dasarnya diikat oleh struktur imajinasi tertentu. Perangkat dari struktur imajinasi tersebut adalah

bahasa. Sebuah masyarakat yang terlestarikan oleh sebuah bahasa tertentu mempunyai kecenderungan terbatas dalam mengembangkan imajinasi. Bahasa tersebut memang telah digunakan sebagai alat penyampaian gagasan di antara sesamanya. Namun, sepanjang bahasa tersebut tidak diperkaya dengan bahasa-bahasa serta pengalaman-pengalaman lain, sepanjang itu pula imajinasi masyarakat tersebut menjadi sangat terbatas.

Dalam konteks integrasi nasional, situasi bahasa semacam ini menjadi problematik. Bagaimana, misalnya, seorang Jawa dengan bahasa tertentu harus berkomunikasi dengan orang-orang Sumatera, Ambon, Sulawesi dan lain-lain sebagainya jika andalan mendiminasikan gagasan dan ucapan hanya bahasa Jawa? Sebaliknya, bagaimana orang-orang luar Jawa bisa memahami masyarakat Jawa jika mereka tidak mengerti dan bahkan tidak berkesempatan mempelajari? maka, dapat kita bayangkan betapa fragmented (terpenggal-penggal)-nya masyarakat Indonesia, jika diukur dengan perkembangan kesadaran yang hanya mengandalkan bahasa-bahasa tersendiri.

Konsekuensi lebih lanjut adalah sulitnya tercapai integrasi nasional. Dalam pengertian yang sederhana, integrasi nasional adalah kesatuan ide, gagasan dan perasaan dari berbagai kelompok masyarakat, etnik dan agama tentang sebuah cita-cita politik besar apa yang kita sebut sebagai perasaan kebangsaan.

Sejauh kelompok-kelompok masyarakat masih terpenggal-penggal dan terbelenggu dengan bahasa mereka masing-masing, tak bisa dibayangkan perasaan kebangsaan yang bersifat lintas etnik, agama dan kelompok masyarakat tersebut bisa tercipta. Yang menguntungkan Indonesia adalah bahwa ada fase dalam sejarah dimana para pemuda berkumpul pada tahun 1928 dan menyatakan diri kesatuan bahasa dengan mengadopsi Bahasa Melayu sebagai bahasa kesatuan. Tetapi persoalannya adalah bahwa mereka yang berkumpul tersebut hanya merupakan segelintir orang muda dan arena itu, tak memberikan jaminan terciptanya perasaan kebangsaan.

Di dalam sejarah, tugas inilah yang dilakukan oleh "Lembaga" PR. Dengan menggunakan infrastruktur Bahasa Indonesia, tokoh-tokoh "PR" telah mendisiminasikan gagasan

Indonesia kepada khalayak publik yang sangat, baik secara langsung atau tidak. Maka, jika kita titil dari sini, "PR" pertama bagi terbentuknya Keindonesiaan adalah para pujangga atau sastrawan, baik dalam sajak-sajak mereka maupun dalam novel-novel. Melalui Bahasa Melayu yang kian menjadi lingua franca di dalam masyarakat nusantara, sajak-sajak dan novel-novel tersebut dibaca oleh khalayak publik lintas etnis yang secara perlahan-lahan menciptakan apa yang disebut Benedict Anderson sebagai *imagined community*. Dalam konteks ini, masyarakat Jawa, Minangkabau, Aceh, Sulawesi dan lain sebagainya mulai memperkaya diri dengan informasi dari berbagai belahan suku lainnya yang secara perlahan membentuk perasaan senasib di antara sesama mereka.

Fondasi kesamaan nasib yang dibangun melalui karya-karya sastra inilah yang dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh "PR" lainnya, yang secara sangat purposive mengarahkan imajinasi public kepada perasaan politik tertentu. Di samping tokoh-tokoh lainnya yang begitu banyak, kita tidak bisa melupakan jasa Soekarno dan Hatta sebagai "Lembaga PR" paling menonjol dalam



mendisiminasikan gagasan Keindonesiaan kepada khalayak publik. Dengan demikian, lahirnya kesadaran Keindonesiaan bisa kita nyatakan adalah hasil kreasi PR "agung" ini. Dengan melihat faktor sejarah ini, kita bisa menyadari bahwa lembaga PR mempunyai peranan yang menentukan dalam membentuk kesadaran publik. Persoalannya adalah bahwa apakah lembaga PR Polri mempunyai kesadaran ekstra tentang peran PR dalam sejarah pembentukan kesadaran Keindonesiaan?

Jika kita lihat perkembangan dewasa ini, kebutuhan paling mendesak yang dihadapi Polri adalah menghadirkan diri sebagai "kawan" dari masyarakat, sebagai kontituennya. Kendatipun benar bahwa sejak UU No. 2 Tahun 2002 Polri kian menyatakan diri sebagai "kawan" masyarakat, namun intensitas upaya ini masih harus ditingkatkan. Apa yang tampak mencolok di mata publik adalah bahwa realisasi gagasan tersebut masih sangat terbatas pada upacara, sebagaimana terlihat pada peringatan Hari Bhayangkara yang baru saja berlangsung, dan sebagaimana yang kita lihat, kegiatan utama lembaga PR Polri masih berkutat



Penyampaian informasi pun bisa dilakukan dengan acara talk show di televisi.

dengan disimulasi informasi tentang apa yang terjadi dan yang sedang diperbuat oleh aparatnya. Kendatipun benar bahwa metode ini telah berlangsung dengan memuaskan, terbukti dengan berbagai informasi yang diperoleh publik tentang berbagai hal mengenai Polri kualitas kinerja tersebut belum mencapai tahap yang optimal.

Penilaian ini muncul dengan acuan pada "PR agung" pencipta rasa Keindonesiaan, seperti Soekarno dan Hatta. Walau benar juga bahwa prestasi kesejarahan tersebut terlalu sukar untuk disamakan oleh

siapapun juga dewasa ini, namun persoalan yang kini dihadapi memaksa lembaga PR mengarahkan kinerja yang mendekati mutu yang sama. Keretakan perasaan nasionalisme dan "pertarungan ideologis" yang kini berlangsung seakan-akan mengingatkan kita pada periode tahap-tahap pembentukan kesadaran nasional di masa lalu. Pada saat yang sama, perkembangan masyarakat yang kian mekar dari sudut aspirasi sosial politik dan ekonomi telah menambah tugas Polri dalam bentuk beban baru yang tak ada presedennya dalam sejarah.

Karena itu, tugas lembaga PR Polri tidak harus berhenti pada segi teknis, melainkan konseptual. Melalui kinerja Polri, lembaga ini mendisiminasikan informasi kepada publik konstituennya. Namun pada saat yang sama, lembaga PR Polri juga harus mampu merumuskan dinamika perkembangan aspirasi masyarakat yang melahirkan program acuan internal Polri. Dalam konteks ini, lembaga PR Polri harus mempunyai kemampuan memberikan in put atau masukan yang memadai tentang bagaimana Polri harus berkinerja di tengah-tengah masyarakat dan mendapatkan penerimaan publik.***



Peserta Latihan PR dan Fotografer Humas Polri saat mendengarkan pengajaran.